
**PERAN SEKOLAH DALAM ANTISIPASI KERACUNAN
PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH-PJAS
(STUDI KASUS TIGA SD DI AIR TAWAR TIMUR PADANG SUMATERA BARAT)**

Selinaswati dan Erda Fitriani

Universitas Negeri Padang

email: selinaswati@yahoo.com, fitriani_cim@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran lembaga pendidikan (Sekolah Dasar) dalam memfasilitasi makanan jajanan sehat bagi para siswanya guna mengantisipasi keracunan makanan jajanan. Tujuan penelitian agar diperoleh solusi antisipasi konsumsi makanan tak sehat dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Penelitian kualitatif bertipe studi kasus ini dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam kepada informan yang diperoleh melalui purposive sampling. Analisa data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Temuan data lapangan menunjukkan pihak sekolah yang mestinya menyiapkan kantin sehat seperti terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, khususnya Bab VIII pasal 42 (2), ternyata masih banyak yang belum merealisasikan peraturan tersebut. Kondisi ini memberi peluang pedagang makanan keliling menjual dagangannya dengan harga murah dari bahanbaku murah yang cenderung tidak memenuhi standar kesehatan. Atas kondisi yang demikian, diperlukan perhatian dan kerjasama berbagai pihak terkait, terutama sekolah dan orang tua siswa diantaranya mendirikan kantin sehat yang dikelola pihak sekolah atau persatuan orang tua murid dan guru dalam bentuk koperasi dan bisa juga bekerjasama dengan para orang tua seperti pemberian bekal makanan sehat pada anak oleh orang tua.

Kata Kunci : Peran, PJAS, Sekolah, Keracunan makanan

Abstract

This study examines the role of elementary school institutions in facilitating healthy snacks food for pupils in order to anticipate food poisoning. The purpose of the research to obtain a solution for pupils to consume healthy food by involving various related parties. The Qualitative research with case study type is done through observation and in-depth interviews toward informants obtained by using purposive sampling. Data analysis was done by using interactive analysis model of Miles and Huberman. The findings showed that the schools supposed to prepare a healthy canteen as mentioned in the Government Regulation (PP) no. 19 of 2005, about National Education Standards, particularly Chapter VIII article 42 (2). Nevertheless, these three schools cannot realizethe regulation pertaining to some limitations they have. Thissituation provides an opportunity for street food vendors to sell cheaply food from cheap raw materials which tend to did not meet the healthy standards food. This condition requires the attention and cooperation of various related parties, especially schools and parents in establishing healthy canteen professionally. It also need more attention of parents in providing healthy food for children during at schools.

Keywords: Healthy food, Elementary School's role, Food poisoning, Street vendors.

Pendahuluan

Peristiwa keracunan makanan jajanan di sekolah ini terjadi di berbagai tempat secara merata di Indonesia dalam beberapa

dekade terakhir. Data dari Direktorat Surveilans dan penyuluhan Keamanan Pangan BPOM menunjukkan bahwa di tahun 2004 telah terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan sebanyak

164 di Indonesia dengan cakupan kasus sebanyak 7.336 dan 51 meninggal dunia.

World Health Organization (WHO) South East Asia Regional Office (SEARO) mendefinisikan keracunan makanan sebagai terkontaminasinya makanan dan minuman oleh bakteri atau patogen sejenis yang dikonsumsi manusia. Akibat yang ditimbulkan keracunan makanan adalah penyakit (seperti diare, demam) dan bahkan kematian. Paling rentan dihindangi keracunan makanan ini adalah anak-anak, ibu hamil, dan para Lansia serta orang-orang yang memiliki sistem imun yang lemah (WHO SEARO, 2015).

Meski sudah dilakukan berbagai usaha oleh banyak pihak untuk mengatasi, fenomena keracunan makanan jajanan tersebut hingga saat ini masih sering terjadi. Untuk Sumatera Barat, Menurut Balai Besar pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Sumbar, selama tahun 2016, telah terjadi 13 kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan dan 8 di antaranya terjadi di sekolah-sekolah. Untuk tahun ini saja, hingga bulan Maret 2017 telah terjadi 3 kasus KLB dan dua diantaranya terjadi di sekolah¹.

Keracunan makanan jajanan anak di sekolah menunjukkan betapa rentannya anak-anak terhadap makanan yang tidak sehat. Hasil survey dan pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan bersama Balai Besar/Balai POM di Indonesia mencatat bahwa 45% PJAS tidak memenuhi syarat kesehatan karena tercemar mikrobiologi dan mengandung bahan kimia berbahaya seperti formalin, boraks, rhodamin, berisi bahan tambahan pangan (BTP) seperti siklamat dan benzoate berlebihan. Kondisi yang demikian, disadari atau tidak, ketika anak mengkonsumsi makanan jajanan tersebut, menimbulkan resiko kesehatan yang berdampak tidak baik bagi gizi dan tumbuh kembang

mereka. Bahkan WHO juga menyebutkan bahwa anak berpotensi terdampak penyakit bawaan akibat mengkonsumsi makanan jajanan yang tidak sehat.

Berdasar data di BB POM Sumbar, keracunan makanan yang terjadi di Sumbar sepanjang tahun 2016 hingga Maret 2017, telah terjadi 16 kali kasus KLB keracunan makanan dan lebih dari separuh, yakni 10 kasus KLB terjadi keracunan makanan jajanan anak di sekolah. Artinya lagi keracunan dominan dialami oleh anak sekolah. Kondisi ini jelas memprihatinkan, karena siswa SD adalah anak-anak yang baru tumbuh dan berkembang yang bisa saja terpapar berbagai penyakit karena seringkali mengkonsumsi makanan tidak sehat. Bila hal ini terus menerus terjadi, anak-anak tersebut tumbuh menjadi generasi yang tidak sehat secara fisik. Kondisi fisik yang tidak sehat sedikit banyak berpengaruh pada kondisi psikis dan dalam jangka panjang bisa jadi berpengaruh kepada kualitas kesehatan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Meski telah banyak pihak yang terlibat dalam menghindari keracunan bagi pelajar SD, realita fakta dan data menunjukkan KLB yang masih tetap ada.

Di lain pihak, adanya kewajiban sekolah sebagai lembaga pendidikan menyediakan sarana kantin atau warung sekolah yang menjual makanan memenuhi syarat kesehatan sepertinya masih belum menjadi perhatian pihak lembaga sekolah secara serius. Padahal sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, pada Bab VIII pasal 42 (2) yang menyatakan bahwa :

“Setiap satuan Pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tatat usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses

¹BPOM Sumbar (13 Maret 2017). Pameran dan Pengawasan PJAS di Dermaga Singkarak. Tersedia: pom.go.id

pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.”

Senada dengan PP tersebut, Keputusan Menteri Pendidikan (Kepmenkes) No. 1429 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan (Kesling) Sekolah, poin 16, juga menyebutkan tentang penting dan perlunya keberadaan kantin atau warung sekolah. Keberadaan kantin atau warung sekolah yang menyediakan makanan yang memenuhi syarat kesehatan guna memenuhi kebutuhan makanan jajanan saat istirahat mutlak ada. Hal itu dikarenakan kantin atau warung sekolah sebagai sarana pendukung utama dalam memenuhi kebutuhan pangan selama siswa beraktifitas di sekolah.

Masih dalam Kepmenkes yang sama, standar kesehatan lingkungan sekolah juga ditandai dengan adanya ketersediaan tempat cuci tangan (wastafel) dilengkapi sabun bagi siswa. Wastafel inipun disediakan satu pada tiap dua ruang kelas. Keberadaan wastafel tersebut sebagai salah satu upaya mendidik siswa untuk membiasakan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Jadi terlihat di sini bahwa sekolah tak hanya untuk menambah ilmu untuk mengetahui, tapi juga untuk mengubah prilaku, karakter baik, termasuk memiliki kebiasaan dan prilaku hidup sehat.

Berdasarkan pasal 42 (2) pada PP dan Kepmenkes tersebut di atas, jelas terlihat ada kewajiban satuan pendidikan atau sekolah menyediakan ruang kantin bagi peserta didiknya, namun faktanya tak semua sekolah memiliki prasarana tersebut, sehingga ketiadaan kantin di sekolah menjadi ajang bagi pedagang makanan keliling untuk menjual dagangannya. Untuk sebagian para orang tua siswa, yang mengetahui dan khawatir dengan kondisi makanan jajanan di luar atau oleh pedagang keliling yang diragukan kebersihan dan gizinya, alternatif yang mereka lakukan adalah dengan membawakan bekal bagi anak ke sekolah. Hanya saja tak semua orang tua siswa berkesempatan menyiapkan dan membawakan bekal untuk anak, terutama bagi ibu bekerja di luar rumah.

Kosekwensinya para siswa berbelanja di luar areal sekolah yang rentan dengan makanan yang tak terjamin kebersihannya. Untuk itu diperlukan solusi mengantisipasi kondisi yang demikian ini. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka pertanyaan penelitian yang hendak dijelaskan dalam penelitian ini yaitu; Bagaimana peran Lembaga Pendidikan (dalam hal ini sekolah) dalam upaya memberikan konsumsi sehat PJAS? Apa saja bentuk kerjasama yang bisa mereka lakukan guna mengantisipasi kasus keracunan yang sewaktu-waktu bisa menjadi Kasus Luar Biasa (KLB).

Metodologi Penelitian

Penelitian dilakukan di tiga Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kota Padang, Sumatera Barat, yakni SD 16, SD 26 dan SD 28. Pertimbangan dilakukannya penelitian pada 3 SD tersebut, karena 3 SD itu letaknya saling berdekatan, pada satu jalur jalan yang sama dan memiliki jadwal yang hampir bersamaan untuk istirahat yakni jam 9.30 pagi hingga 10.00 (SD 26 dan 28), dan dari pukul 10.00 hingga pukul 10.30 (SD 26). Lokasi SD yang saling berdekatan memungkinkan untuk melihat perbandingan dinamika anak-anak mengkonsumsi PJAS pada tiga sekolah tersebut. Jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan tipe studi kasus ini dilakukan selama tiga bulan mulai Agustus hingga November 2017. Data dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Wawancara kepada pihak yang terkait dengan pihak sekolah, orang tua dan pedagang dan dinas terkait dengan PJAS ini seperti Diknas, Dinkes dan BB POM Sumbar.

Hasil dan Pembahasan

Dari tiga sekolah yang diamati beberapa kali saat jam istirahat sekolah, diketahui bahwa jumlah siswa yang cenderung banyak berbelanja di luar pekarangan adalah siswa SD 28 diikuti SD

16, sedangkan SD 26, jumlah siswanya lebih sedikit yang berbelanja di luar pekarangan. Diketahui juga bahwa 3 sekolah ini masuk dalam program pangan jajanan sehat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BB POM), Padang Sumbar. Program 2017BB POM Sumbar yakni kegiatan mendatangi 50 sekolah untuk dilakukan tes sampel makanan dan mengingatkan pihak sekolah tentang bahaya jajanan makanan anak sekolah yang dijual di depan sekolah. Diketahui dari hasil program melakukan tes sample tersebut, salah seorang pedagang di depan SD 28 menjual kerupuk kuah yang memiliki kandungan bahan pengawet melebihi batas aman dan dianggap berbahaya. Saat dikonfirmasi ke pihak BB POM Sumbar, diperoleh informasi bahwa si pedagang ditanyai di mana membeli kerupuk kuah dan dijelaskan tentang bahaya kerupuk tersebut agar tidak menjualnya lagi. Lebih lanjut terkait dengan temuan zat bahaya tersebut, dikatakan BB POM Sumbar bahwa sample cepat terbukti ada bahan berbahaya, namun untuk bisa ditindaklanjuti ke agen kerupuk di pasar harus diiringi dengan hasil laboratorium BB POM dan itu masih menunggu hasil karena banyaknya pemeriksaan sampel yang dicurigai mengandung bahan berbahaya di laboratorium BB POM.

Dari hasil pengamatan diketahui pedagang yang menjual kerupuk kuah berbahan baku bahaya itu tidak mengeluarkan dagangan itu sekitar seminggu namun kemudian, ketika didatangi sebulan berikutnya sudah ada kerupuk kuah lagi yang dibeli para siswa, diakui penjual ia membeli bahan kerupuk yang baru, tapi juga tak menjelaskan saat ditanyakan kerupuk yang lama dikemakan. Sementara dicurigai bahwa jenis kerupuk yang digoreng tersebut masih persis sama dengan yang lama, hanya saja pihak BB POM belum lagi melakukan tes sample untuk kerupuk ini. Tampak di sini pedagang tak mau rugi karena telah membeli bahan makanan yang tidak sehat dan tetap menjualnya karena yakin tim BB

POM tidak mengecek lagi setelah kedatangan mengambil sampel.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa tak hanya kerupuk jenis makanan lainnya juga patut dicurigai, tapi pewarna merah pada sosis yang dijual pedagang keliling dan pemanis pada minuman gelas dan sachet cukup membuat kerongkongan panas saat diminum karena teramat manisnya minuman tersebut. Hanya saja bagi para siswa SD, jenis makanan yang terlalu mencolok warnanya dan berlebihan manisnya itu bukan suatu yang dikhawatirkan. Justru yang demikian masih tetap jadi minuman vaforit banyak siswa.

Diketahui di setiap sekolah memang ada anak yang dibawakan bekal oleh orang tua murid dari rumah namun jumlahnya sangatlah sedikit. Seperti pada SD 28 yang tidak memiliki kantin, guru kelas enam mewajibkan anak-anak yang belajar tambahan yang diadakan tiga kali seminggu untuk persiapan Ujian Akhir Nasional (UAN) membawa bekal dari rumah. Seperti dikatakan salah seorang guru kelas :

“...Mereka akan UAN, jadi kami mengadakan kelas tambahan setelah selesai sekolah jam setengah satu. Biasanya kami mulai belajar tambahan mengerjakan latihan soal pada jam setengah dua sampai jam empat. Jadi mereka perlu makan siang di sekolah. Sebab bila perut tak diisi makanan mengeyangkan, pelajaran sulit diterima...Maka saya tegaskan kalau tidak bawa bekal dari rumah tidak usah masuk belajar tambahan lebih baik pulang...” (Wawancara guru kelas 6 SD 28, Yuliarni, S.Pd Selasa, 14 November 2017).

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa anak kelas 6 SD 28, sejak mereka memulai belajar tambahan untuk persiapan UAS, pada bulan Oktober kemarin ‘diwajibkan’ membawa bekal makan siang ke sekolah sehubungan dengan panjangnya jam belajar yang mereka tempuh pada tiga hari seminggu yakni Senin Rabu dan Jumat.

Terbentuknya lembaga pendidikan, dalam hal ini sekolah, salah satunya dapat dikatakan sebagai konsekuensi logis dari perkembangan masyarakat yang semakin

kompleks dan berkembang terus menerus; dimana institusi keluarga sebagai fungsi sentral untuk mendidik dan mentransfer pengetahuan kepada generasi dalam keluarga itu sudah tak mampu lagi mengakomodasi kebutuhan pendidikan anggota keluarganya. Hal itu lantaran kesibukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, atau karena adanya tuntutan hasrat aktualisasi diri terkait dengan tingkat pendidikan perempuan yang sudah tinggi. Maka untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan dan skill yang tak lagi bisa diberikan oleh keluarga atau untuk mendidik anak-anak dalam satu keluarga, diserahkan kepada lembaga yang disebut lembaga pendidikan². Hanya saja lembaga pendidikan seperti sekolah kadang juga belum maksimal dalam mengakomodasi kepentingan anak didiknya.

Untuk itulah sosiologi pendidikan, yang mengkaji hubungan tingkah laku manusia dan institusi sosial yang terkait dengan pendidikan sedikit banyak dianggap berkorelasi positif dalam mengkaji fenomena keracunan makanan jajanan anak sekolah. Menurut Karsidi (2005) salah satu ruang lingkup kajian Sosiologi Pendidikan adalah lembaga pendidikan di tengah masyarakat; Persisnya terkait dengan pola-pola interaksi antara sekolah sebagai lembaga pendidikan dengan kelompok sosial atau struktur sosial yang ada di tengah masyarakat sekitar sekolah³. Dalam konteks kajian pendidikan dan ekonomi, dapat dilihat bahwa institusi pendidikan berpengaruh pada perkembangan ekonomi penduduknya; Semakin bertumbuhnya sekolah dan kebutuhan anak untuk sekolah, menimbulkan konsekuensi waktu yang dihabiskan anak cukup lama di sekolah,

yakni sekitar seperempat hingga sepertiga waktu anak setiap harinya berada di sekolah. Dengan demikian, untuk konsumsi keseharian anak juga dilakukan disekolah.

Di banyak sekolah pemenuhan kebutuhan makan siang dan saat keluar jam istirahat ternyata tidak disediakan oleh sekolah tapi sebaliknya pelaku ekonomi dalam hal ini pedagang keliling menjadikan situasi anak sekolah saat keluar jam istirahat ini sebagai pasar terbaik mereka. Maka jadilah para pedagang makanan keliling menjual makanan anak sekolah dengan target pembeli adalah siswa-siswa SD ini. Persoalan keracunan kemudian muncul ketika produk makanan yang dijual tidak sesuai dengan standar kesehatan. Walaupun bukan keracunan setidaknya sejumlah penelitian dan pemeriksaan BB POM Sumbar, ditemukan jenis makanan yang tidak sesuai standar kesehatan.

Kerja Lintas Sektor Minimal dalam Konsumsi Makan Sehat Anak

Berdasar hasil temuan di lapangan dapat dianalisis bahwa makanan jajanan anak sekolah pada tiga SD yang diteliti pada dasarnya masih belum memenuhi standar kesehatan, masih ditemui sejumlah jenis Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang mengandung bahan berbahaya dan berpotensi siswa mengalami keracunan dan merusak kesehatan mereka. Di sisi lain, pihak BB POM belum maksimal melakukan pengawasan, sosialisasi dan evaluasi. Begitupun dengan pihak sekolah, belum memiliki langkah khusus atau kebijakan terkait dengan makanan jajanan anak sekolah yang sehat sehingga bisa menghindari anak dari kontaminasi makanan yang terkena bakteri dan rawan dengan resiko keracunan.

Ketakberdayaan yang dialami pihak sekolah terkait dengan kondisi minimnya kantin sehat; Dari wawancara terungkap bahwa lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah mengalami ketiadaan anggaran untuk membangun kantin yang secara fisik memadai dan memenuhi standar kesehatan. Jadi berbagai persoalan melingkupi

²Elly M Setiadi & Usman Kolip (2011) "Pengantar Sosiologi pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, teori, Aplikasi dan pemecahannya. Jakarta: Kencana Prenada Media. Hal 911

³Karsidi (2005), "Sosiologi Pendidikan", Solo. Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press). Hal 3

sekolah-sekolah tersebut, mulai dari minimnya sarana dan prasarana terkait dengan kesehatan lingkungan sekolah hingga ketidakmampuan pihak otoritas dalam hal ini pimpinan lembaga pendidikan menetapkan aturan larangan berbelanja makanan jajanan saat istirahat sekolah di luar areal sekolah bagi siswa dan menetapkan aturan tegas bagi pedagang, penjaja makanan keliling yang berdagang rutin sesaat jam istirahat di luar areal sekolah.

Ketika dikonfirmasi ke pihak Dinas Pendidikan Kota Padang, Bapak Ramson, bagian pendidikan Dasar dan Muhammad Amin bagian Sarana dan Prasaran di Dinas Pendidikan Kota Padang, dikatakan bahwa kantin sepertinya masih belum jadi prioritas terkait masih banyaknya persoalan ruang kelas yang belum memadai pada 304 sekolah SD dan SMP di Kota Padang. Meski ada empat sumber dana untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah yakni; dana dari APBN, APBD, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOS Daerah, tetap saja semua dana tersebut lebih difokuskan untuk pembayaran gaji guru honor, biaya operasional sekolah dan kelengkapan sarana fisik ruang-ruang kelas, tapi tidak menjangkau hingga pengadaan ruang kantin sekolah yang sesuai standar kesehatan.

Ketersediaan kantin sehat sebagai sarana pendukung proses belajar mengajar para siswa di sekolah adalah penting, oleh karena itu keberadaan kantin sehat yang dikelola secara profesional boleh dikatakan cukup penting. Dari tiga sekolah yang diteliti, hanya satu sekolah yang memiliki kantin yakni SD 26, dua sekolah lagi tidak memilikinya. Ini membuktikan pengembangan kelembagaan pendidikan, dalam hal sarana dan prasarana perlu lebih ditingkatkan lagi.

Perlu dipikirkan agar setiap sekolah memiliki kantin sehat yang mengakomodasi kepentingan semua siswa peserta didik. Tak hanyaruang dan tempat belajar yang layak dan nyaman, fasilitas kesehatan mereka juga perlu diperhatikan. Diperlukan

kerjasama semua pihak terkait seperti dinas pendidikan, komite sekolah, pimpinan sekolah dan majelis guru sebagai komponen utama pendidikan mengambil jalan tengah mencari solusi agar kantin sehat, sebagai salah satu solusiantisipasi keracunan makanan di sekolah.

Bahwa pengadaan kantin sehat diiringi dengan penyediaan alokasi dana untuk pembangunan kantin sehingga pihak sekolah dan komite sekolah tidak terbebani dengan jumlah biaya yang dibutuhkan dalam membuat kantin sehat. Pihak sekolah sebagai lembaga pendidikan ditantang untuk lihai dan mampu mengembangkan kemandirian dalam memajukan sekolah. Kelihaiian pimpinan lembaga pendidikan sekolah dasar dalam upaya mengembangkan kantin sehat ini bisa dilakukan dengan berbagai strategi; diantaranya dengan melakukan swadaya antara komite sekolah, para orang tua murid dan guru-guru untuk patungan atau membentuk koperasi yang khusus mengelola kantin sehat. Lengkap dengan sarana cuci tangan(Wastafel) bagi anak-anak. Di samping itu untuk menjaga kebersihan, alat tukar yang dipakai berbelanja tak mesti langsung berupa uang yang sudah beralih ke banyak tangan, tapi bisa dilakukan dengan cara voucher atau coin khusus sebagai alat tukar yang aman saat berbelanja sehingga kebiasaan hidup bersih tetap terjaga

Upaya lain bisa dilakukan dengan mengundang pihak ketiga sebagai penyandang dana guna memodali lokasi areal kantin dan memfasilitasi para pedagang keliling untuk berdagang di area sekolah sesuai dengan aturan sekolah dan standar kesehatan sehingga terjaminnya konsumsi PJAS sehat bagi siswa-siswa. Kerjasama dengan pihak orang tua juga dibutuhkan mengingat keterbatasan dana pihak lembaga pendidikan. Keterlibatan orang tua melalui komite sekolah dan partisipasi aktif menjadikan kantin sehat dengan cara membuat kue (terutama bagi ibu Rumah Tangga) dan menjualnya di kantin sehat di sekolah anak. Hal ini tentu

berdampak positif, bagi IRT melalui income yang diperoleh dari jual makanan sehat.

Telah ada usaha dari pihak BB POM Padang, Sumbar guna mengantisipasi anak sekolah agar tidak mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dengan cara turun ke lapangan mengambil sampel tes makanan di 50 sekolah yang ada di Kota Padang selama semester pertama tahun 2017. Namun demikian usaha tersebut masih belum maksimal karena bila terjadi kasus, maka sulit untuk menelusuri pedagang keliling yang menjual makanan yang tidak sehat tersebut. Maka akan lebih baik ada kerjasama antara pihak sekolah dengan BBPOM selain dengan memantau tapi juga mencatat secara detail data para pedagang keliling yang biasa mangkal di depan sekolah mereka. Dengan cara memintakan fotocopy KTP. Alternative lainnya bekerjasama dengan mereka dengan cara menyediakan sarana dan prasana bagi pedagang keliling untuk memiliki tempat yang legal bukan di luar halaman sehingga bisa diketahui dengan jelas unsur dan jenis makanan yang dijual

Penutup

Dapat dikatakan bahwa kebijakan tentang makanan sehat sepertinya masih belum menjadi agenda utama pihak sekolah. Meski ada yang sudah menetapkan aturan, tapi tidak tegas melarang siswa-siswa belanja makanan saat jam istirahat. Kondisi yang demikian ini membuat siswa rentan dengan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, yang dalam jangka panjang akan membahayakan kesehatannya dan mempengaruhi kualitas SDM bangsa. Masih belum adanya kantin sehat di tiga sekolah yang diteliti sudah harus menjadi pertimbangan bagi pihak terkait untuk mengembangkan program sekolah dan kantin sehat yang sejalan dengan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Meski anggaran tidak disediakan oleh pihak Dinas Pendidikan untuk pembangunan kantin, sudah semestinya pihak terkait, dalam hal

ini sekolah dan para orang tua yang tergabung dalam komite sekolah, pimpinan sekolah dan jajarannya agar saling bekerjasama, mengeluarkan dana dan beriyur sebulan ditetapkan sekian sehingga diperoleh pendanaan yang tepat untuk mengelola kantin sehat dan kerjasama lintas sektoral antara pihak terkait seperti lembaga pendidikan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan BB POM Sumbar sangatlah penting demi suksesnya tujuan memberikan makanan sehat kepada siswa-siswa SD dan mengantisipasi keracunan makanan jajanan anak sekolah.

Diperlukan pengetahuan dan penjelasan tentang bahaya makanan yang mengandung 5P (Penyedap, pewarna, pengawet, pemanis buatan dan pengemulsi) kepada para orang tua siswa sehingga selalu mengingatkan anak untuk belanja makanan yang hygiene sesuai standar kesehatan.

Diperlukan negosiasi dan kerjasama yang baik antara guru, pimpinan sekolah dengan para pedagang makanan yang sering mangkal di depan sekolah. Dengan adanya negosiasi dan kerjasama tersebut, diharapkan adanya proses berdagang yang terpola, diketahui jelas identitas para para pedagang keliling; semisal pihak sekolah menyimpan dokumentasi fotocopy KTP pedagang, sehingga sewaktu-waktu bila ada KLB bisa ditelusuri jejak pedagang tersebut. Dengan demikian PJAS sehat dan bersih akan tercipta dan pada akhirnya berpengaruh pada konsumsi makanan sehat bagi siswa-siswa SD.

Daftar Pustaka

- Berry, David.(1983). *Pokok-Pokok Pikirian dalam Sosiologi*. Jakarta: CV Radjawali.
- BPOM Sumbar (13 Maret 2017). Pameran dan Pengawasan PJAS di Dermaga Singkarak. Tersedia: pom.go.id, diakses 3 Oktober 2017.

- BPS (5 November 2014). Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Barat No.66/11/Th.XVII
- Idi, Abdullah.(2013). *Sosiologi Pendidikan, Individu, Masyarakat dan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indriyani, Azizah. (2009). “Pengaruh Konflik Peran Ganda dan Stress Kerja terhadap Kinerja Perawat Wanita Rumah Sakit” (Studi pada Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah,Semarang), Thesis S2 Program Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Judarwanto, Widodo. (2013). Prilaku Makan Anak Sekolah, Picky Eaters Clinic, Klinik khusus kesulitan makan pada anak, <http://kesulitanmakan.bravehost.com>, diakses 1 November 2017
- Karsidi, Ravik. (2005). *Sosiologi Pendidikan, Solo: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press)*.
- Maherani, Astrani. (2013). “Pengaruh Konflik Peran ganda dan Fear of Success terhadap Kinerja Wanita Berperan Ganda” Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Konflik Peran Ganda pada Pegawai Wanita Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang”.
- Milles, Matthew B. &Huberman Michael A.1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Pres.
- Moleong, Lexy J. (1994). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nasution.1992. *Metode Penelitian Kualitatif Naturalistik*. Bandung: Tarsito.
- Priyono, Herry B. (2002). *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Ritzer, George & Goodman,Douglas J .(2004). *Teori Sosiologi Modern* Jakarta: Kencana Prenada Media
- Samuri. (2011) “Peran Komite Sekolah dalam pengembangan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar Standar Nasional (Studi KASus di SDN Pandean 1 Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.)” Thesis S2 Program Pasca Sarjana Prodi Penyuluhan Pembangunan UNS Solo.
- Setiadi, Elly M & Kolip, Usman. (2011). *Pengantar Sosiologi: pemahaman Fakta dan gejala Permasalahan Sosial, Teori Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Siregar, Mastauli. (2007). Keterlibatan Ibu bekerja dalam Perkembangan Pendidikan Anak. *Jurnal Harmoni Sosial*, Volume II No.1, September 2007
- Sugiyono. (2009) *Metode Penelitian Kualitatif R & D*, Bandung: Alfabet
- World Health Organization (WHO), (2015). “Essential Safety Requirements for Street Vended Food,” revised edition. Serial online. <http://www.who.int> , diakses 12 November 2017
- , (2015) Penyakit Akibat Keracunan Makanan, [www.searo.who.int,http://www.searo.who.int/indonesia/publications/foodborne_illness_es-id_03272015.pdf](http://www.searo.who.int/indonesia/publications/foodborne_illness_es-id_03272015.pdf), diakses 15 November 2015